**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber-sumber agraria. Kekayaan sumber agraria tersebut termasuk tanah menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia hampir 70 % kehidupan mereka bergantung pada sektor pertanian dengan menjadi petani dan tinggal di pedesaan.[[1]](#footnote-2)

Keberadaan tanah bagi petani selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya juga merupakan bagian dari kehidupan mereka karena dari tanah itu pula petani mengembangkan kedudukan atau fungsi sosialnya yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, Ironisnya, sejak zaman kolonial, bahkan jauh sebelumnya, yakni zaman kerajaan hingga kini sejarah pertanahan yang identik dengan nasib petani itu tidak banyak menunjukkan tanda – tanda perbaikan. Kehidupan petani selalu terombang-ambing akibat ketidakpastian dari negara tentang pertanahan yang sering berubah-ubah.[[2]](#footnote-3)

Perubahan kondisi tanah akibat ulah manusia (*human action*) termasuk kebijakan agraria penguasa secara politik, berjalan seiring makin meningkatnya kebutuhan dan kepentingan. Pemerintah di satu sisi dengan kepentingan pembangunaran fasilitas dan sarana umum, dengan kebijakannya melakukan penggusuran atas tanah milik rakyat. Pada sisi lain penduduk sebagai pemilik tanah sah baik secara adat maupun hukum Negara digusur dengan alasan ganti rugi, yang berarti ada pengganti tanah tersebut tetapi tetap saja rugi.[[3]](#footnote-4)

Diterbitkannya undang – undang agraria (*Agrarische Wet)* pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial menjadi tonggak penting bagi sejarah petani di Indonesia. Dengan adanya undang – undang tersebut, pemerintah kolonial dapat memberikan keleluasaan kepada pengusaha swasta asing untuk dapat menyewa tanah dalam waktu yang panjang dan dengan harga yang murah.[[4]](#footnote-5)

Aturan tersebut juga menjadi acuan bagi pengusaha perkebunan untuk memperluas perkebunannya dengan mengambil tanah-tanah milik rakyat yang mustahil dapat menunjukkan kepemilikannya, karena pada saat itu politik administrasi tanah negara jajahan sengaja menciptakan situasi semacam ini yang kemudian memicu manifestasi konflik dengan penguasaan sumber daya agraria yang tidak adil bagi rakyat.

Pasca berakhirnya kolonialisme di Indonesia struktur kepemilikan dan penguasaan tanah masih timpang, maka setelah Indonesia merdeka (1945-1965) Presiden Soekarno membuat kebijakan untuk terjaminnya hak dasar rakyat atas sumber daya agraria dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA-1960) dengan mengacu pada ketentuan yang termakhtub dalam UUD 1945 Pasal 33 (Ayat 2 dan 3).[[5]](#footnote-6)

Perubahan dramatis dari rezim orde lama ke orde baru, membawa akibat pokok dalam strategi politik agraria yang kapitalistik diterapkan oleh Presiden Soeharto dengan penghapusan kekuatan politik rakyat melalui praktek pemerintahan yang otoritarian.[[6]](#footnote-7) Berbagai program agraria termasuk program “revolusi hijau” dalam bentuk-bentuk penguasaan sumber-sumber agraria oleh negara dan swasta bentuk areal perkebunan, kehutanan dan eksploitasi pertambangan dengan modal besar, sehingga membuat lepasnya akses dan kontrol petani terhadap lahan garapannya.[[7]](#footnote-8) Pemerintah Orde baru, dalam hal kebijakan agraria mengambil jalan yang dikenal sebagai *by-pas approach,* yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria.[[8]](#footnote-9) Dengan menghapus semua legitimasi program *land reform[[9]](#footnote-10)* di masa orde lama dan penghapusan kekuatan politik rakyat dengan menggunakan kekuatan Negara.

Sebagai akibat *by-pass approach*, konflik agraria di Indonesia bukan mereda, tetapi sebaliknya semakin meningkat seperti diungkapkan oleh Gunawan Wiradi sebagai berikut:

*Konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaian dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dam juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling berlomba untuk mendahului mecapai objek itu, sifatnya masih dalam batas persaingan.[[10]](#footnote-11)*

Ketimpangan agraria di Indonesia telah menyebabkan rakyat terkhusus kaum tani untuk mengaktualisasikan diri dengan melakukan perlawanan dalam mempertahankan tanah yang dimilikinya. Khususnya di Kabupaten Takalar, masuknya perkebunan tebu skala besar milik PTPN XIV Takalar dengan mengambil alih hak penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat sekitarnya sehingga mengakibatkan masyarakat tergusur dari tanah yang merupakan sumber penghidupan utama dan sehingga memicu terjadinya konflik agraria hingga saat ini antara petani dan perusahaan.

Upaya perjuangan petani Polongbangkeng Takalar yang begitu panjang sejak zaman Orde Baru dalam mengambil alih kembali tanah mereka yang dikuasai oleh perkebunan tebu PTPN XIV telah memacu kesadaran politik mereka untuk berjuang dan mendirikan organisasi massa tani yakni *Serikat Tani Polongbangkeng Takalar* yang menghimpun kaum tani dengan garis politik demokratis nasional dengan cita-cita perjuangan untuk hak masyarakat polongbangkeng atas tanah dan mewujudkan reforma agraria sejati.[[11]](#footnote-12) Proses kemunculan dari organisasi gerakan tani ini dapat menunjukan dua hal secara sekaligus, yaitu penyebab atau asal usul (kajian sejarah) terjadinya aksi perebutan tanah oleh petani dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Proses keberlanjutan dari gerakan sebagai aksi petani untuk mempertahankan tanah, dapat menunjukan perkembangan gerakan petani menuju *reforma agraria sejati[[12]](#footnote-13)* berserta kaitaannya dengan berbagai kekuatan sosial lain baik di dalam atau di luar. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah tentang organisasi *Serikat Tani Polongbangkeng* dengan tinjauan *history* secara kritis dan komprehensif.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun permasalahan yang akan dikaji di dalam makalah ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Organisasi Serikat Tani Polongbangkeng Takalar ?
2. Bagaimana strategi Serikat Tani Polongbangkeng Takalar dalam memperjuangkan hak atas tanahnya terhadap PTPN XIV?
3. Bagaimana dampak perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng di Takalar?

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang dibahas, maka diperlukan suatu batasan ruang lingkup waktu, tempat dan materi. Ruang lingkup spasial/tempat dalam penelitian ini dilakukan di 2 desa yakni Desa Timbuseng dan Desa Barugayya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penulis memilih 2 desa dari 11 desa yang telah berkonflik puluhan tahun dengan PTPN IX dikarenakan Desa Timbuseng dan Desa Barugaya adalah 2 desa yang menjadi pusat konsolidasi, kegiatan dan agenda-agenda penting organisasi. Desa Timbuseng merupakan lokasi Sekretariat Serikat Tani Polongbangkeng dan Desa Barugaya sering menjadi tempat konsolidasi dan pendidikan-pendidikan anggota Organisasi Serikat Tani Polongbangkeng baik yang bersifar politik maupun organisasi.

Selain itu penulis juga membatasi penelitian secara temporal yakni dimulai dari tahun 2008 sampai 2014, dimana pada tahun 2008 terjadi peristiwa penembakan petani Polongbangkeng Utara dilakukan yang oleh oknum aparat Brimob Polda SULSELBAR.[[13]](#footnote-14) Dari peristiwa tersebut beberapa organisasi mahasiswa dan LSM di Makassar berinisiatif melakukan proses advokasi bersama masyarakat Polongbangkeng dan menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi massa Serikat Tani Polongbangkeng. Sedangkan penulis mengambil tahun 2014 sebagai batasan tahun karena pada tahun tersebut Serikat Tani Polongbangkeng melaksanakan kegiatan panen raya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil perjuangan yang didapatkan dan kerja keras kehidupan kaum tani dalam mendapatkan hak atas tanahnya.

**F. Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Serikat Tani Polongbangkeng Takalar pada tahun 2009
2. Untuk mengetahui strategi dan bentuk perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng Takalar dalam mendapatkan hak atas tanahnya.
3. Untuk mengetahui dampak perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng Takalar terhadap masyarakat sekitar.

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan judul di atas adalah sebagai berikut, untuk :

1. Memberikan pengetahuan dan gambaran proses terbentuknya Serikat Tani Polongbangkeng Takalar.
2. Memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai strategi dan bentuk perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng Takalar dalam mendapatkan hak atas tanahnya
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng Takalar terhadap masyarakat sekitar.

**H. Penelitian Sebelumnya**

Berdasarkan penelusuran penulis belum ada penelitian sejarah langsung mengenai Serikat Tani Polongbangkeng di Takalar, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sudah ada dalam bentuk *Jurnal Tanah Air Walhi* penulis Zulkarnain Yusuf[[14]](#footnote-15). Selain itu ada juga monograf penelitian sistematis dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) 2012 tentang *“Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Awal Abad 21”.* Laporan ini membahas tentang penelitian mengenai dinamika perjuangan agraria di Polongbangkeng Takalar yang menjurus pada konflik agraria serta alternatif penyelesaian konflik antara petani Polongbangkeng dan Pabrik Gula Takalar.[[15]](#footnote-16)

Selanjutnya Mustain (2007) dengan judul “*Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara”.*[[16]](#footnote-17) Dan buku tentang *“Gerakan\_Gerakan Agraria Transnasional”* oleh Saturnino M Borras JR, Marc Edelmen dan Christobal Kay (2010)[[17]](#footnote-18). Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fajrin (2011), Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor yang berjudul *“Dinamika Gerakan Petani: Kemunculan dan Kelangsungannya (Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”*.[[18]](#footnote-19)

1. **Metode Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnnya, maka penelitian ini dilakukan di 2 desa yakni Desa Barugayya dan Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Takalar. Saat ini sepengetahuan penulis 2 desa tersebut merupakan lokasi yang sering digunakan oleh Serikat Tani Polongbangkeng Takalar sebagai pusat konsolidasi organisasi dan kegiatan yang bersifat politik seperti pendidikan maupun kegiatan budaya. Selain itu juga, petinggi-petinggi organisasi mayoritas bertempat tinggal di 2 desa tersebut sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dan data akurat sebagai bahan penelitian skripsi ini.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. kualitatif. Karena itu untuk mendukung penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan akan lebih bersifat ilmiah dan historik. Penelitian mengenai ***“Serikat Tani Polongbangkeng (2008-2014)”***merupakan suatu penelitian sejarah karena penelitian ini di arahkan untuk meneliti, mengungkap, dan menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan mempergunakan metode sejarah

. Tujuan dari penelitian sejarah ini yaitu untuk menemukan dan mendeskripsikan secara deskriptif kualitatif serta menafsirkan latar belakang terbentuknya organisasi Serikat Tani Polongbangkeng yang menghimpun petani Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar dalam mewujudkan cita-cita untuk mendapatkan kembali tanah yang pernah digarapnya dan upaya-upaya yang bersifat organisasi maupun politik dalam penyelesaian dengan PTPN XIV Takalar serta dampak yang ditimbulkan dengan masyarakat dan eksistensinya.

Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, harus melalui prosedur kerja sejarah. Secara sederhana penulisan sejarah dapat dijelaskan beberapa tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*[[19]](#footnote-20)*.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Kuntowijoyo[[20]](#footnote-21), terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi kritik sejarah, interpretasi, dan penulisan. Pemilihan topik berkenaan dengan alasan peneliti mengangkat topik ini (berupa kedekatan intelektual dan kedekatan emosional). Pengumpulan sumber berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi. Verifikasi kritik sejarah berkenaan dengan uji keabsahan suatu sumber. Interpretasi berkenaan dengan pencarian dan keterkaitan makna antar fakta, sedangkan penulisan berkenaan dengan laporan hasil penelitian. Implementasi tahapan-tahapan kerja tersebut dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian lain dari proposal ini.

Heuristik merupakan tahap awal dalam usaha penulisan makalah ini. Dalam proses ini kegiatan difokuskan dan diarahkan pada proses penyelidikan sumber-sumber tertulis yang relevan serta sumber lisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**a. Kajian Pustaka**

Pengumpulan sumber-sumber tertulis dilakukan dengan membuka koleksi pribadi, meminjam dari teman serta mengunduh dari internet. Hal yang menjadi kendala ialah belum adanya penelitian sejarah yang orisinil terkait Serikat Tani Polongbangkeng Takalar yang bisa menjadi analisis dan inspirasi bagi lahirnya pemecahan masalah dalam melaksanakan penelitian. Tetapi masih banyak pula literatur-literatur yang relevan untuk memperkaya perspektif penyelesaian peneltian.

**b. Penelitian Lapangan**

Dalam penelitian lapangan yang akan saya lakukan saya menerapkan cara yaitu:

1. Wawancara

 Mengingat yang ingin diketahui proses latar belakang terbentuknya Serikat Tani Polongbangkeng serta masih hidupnya pelaku sejarah yang ada beberapa sebagian telah menjadi pimpinan organisasi maka penulis menelusuri dan mengidentifikasi anggota-anggota atau pimpinan Serikat Tani Polongbangkeng di Takalar untuk diwawancara yang dianggap memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan tulisan ini. Wawancara yang dilakukan ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung, sebab besar dugaan responden enggan meladeni pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kaku, sistematis dan berkesan terencana.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan mengumpulkan gambar-gambar yang berkenaan dengan aktivitas Organisasi Serikat Tani Polongbangkeng.

**4. Teknik Analisis Data**

a. Kritik Sumber

Perlunya kritik sumber setelah dilaksanakannya langkah-langkah pengumpulan sumber sejarah karena sifat-sifat sumber data-data sejarah berbeda dengan sumber data-data ilmu sosial lainnya dikarenakan penelitian sejarah tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung dan setiap sumber sejarah yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara cermat sesuai dengan fakta sejarah yang sesungguhnya.[[21]](#footnote-22)

Terdapat penekanan tertentu dalam proses kritik sumber, yang bertujuan untuk memberikan definisi terperinci kritik sumber itu sendiri.

*Tujuan dari kegiatan-kegiatan itu ialah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya ia harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber.[[22]](#footnote-23)*

Dalam metodologi sejarah, setelah melalui tahapan heuristik selanjutnya adalah tahap kritik. Kritik diperlukan untuk verifikasi sumber-sumber yang telah diperoleh yang berfungsi menguji keaslian dan kebenarannya. Kritik terbagi atas dua tahapan, yakni kritik eksternal dan kritik internal.[[23]](#footnote-24)

a. Kritik Eksternal

 Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah. Keaslian yang dimaksudkan yaitu sumber asli bukan tiruan, sumber benar yang diinginkan, dan sumber belum mengalami perubahan.

b. Kritik Internal

Kritik internal merupakan kelanjutan dari kritik eksternal. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran isi dari sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Membandingkan isi sumber yang satu dengan yang lain dalam permasalahan yang sama maka keabsahan sumber dapat diketahui. Dalam sumber lisan, maka yang perlu dibandingkan adalah pernyataan informan yang satu dengan yang lain.

**5. Interpretasi (Penafsiran)**

Tahapan selanjutnya setelah proses kritik adalah interpretasi. Pada hakikatnya, interpretasi sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Interpretasi diperlukan karena dibutuhkan penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau.[[24]](#footnote-25)

Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri itu bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data dan fakta yang diperoleh guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama

1. **Historiografi (Penulisan Sejarah)**

Tahapan selanjutnya setelah interpretasi dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Secara umum, penulisan makalah ini bersifat deskriptif analitis serta eksplanatif. Tidak semua peristiwa dan perubahan yang mengikutinya disajikan secara naratif dan imajinatif, partisipatif. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

1. Hendro H.S*, Peranan Pendidikan Politik Organisasi Massa Petani (Studi kasus : Organisasi Massa Tani AGRA Ranting Desa During Tonggal,* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), hlm.1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mustain, *Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmadin, *Sejarah Agraria, Sebuah Pengantar*  (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), hlm. 32. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mochammad Fajrin*, Dinamika Gerakan Petani: Kemunculan dan Kelangsungannya (Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis),”*(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekologi Manusia Insititut Pertanian Bogor, 2011), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mustain**,** *Op.cit****.****,* hml.15. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmadin, *Op.cit****.,*** hal.76. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nancy Lee Peluso, *et al*. *, “Mengklaim tanah untuk reformasi: Gerakan Agraria dan Lingkungan di Indonesia,” Gerakan-Gerakan Agraria Transnasional*, *eds*. Saturnino M Borras JR, Marc Edelmen (Bogor: Sajogyo Institute, 2010), hlm. 313. [↑](#footnote-ref-8)
8. Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir* (Bandung: Akatiga, 2009), hlm.49. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Land reform,* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Dengan meningkatkan penghasilan petani. “Pengertian Land Reform,” <http://www>. tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-2/hukum/hukum-agraria/pengertian-landreform/(akses pada tanggal 05 Juli 2014, 16.41 Wita). [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, hlm.43. [↑](#footnote-ref-11)
11. Zulkarnain Yusuf, “Eksistensi PTPN XIV Takalar Atas Praktik Perampasan Tanah Masyarakat Polongbangkeng,” *Jurnal Tanah Air Walhi*, (Edisi Desember 2012-Januari 2013), hlm.61. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Reforma Agraria Sejati* adalah jalan untuk menjawab dan menegakkan kedaulatan kaum petani di Indonesia dengan menghapuskan monopoli atas tanah oleh Imperialis dan tuan tanah serta penyedian tanah untuk petani di Indonesia agar dimanfaatkan tanahnya secara bebas, mandiri dan tanpa penghisapan. “ Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah, Wujudkan Kedaulatan Pangan,” *Serial Propaganda Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyambut Hari Tani Nasional ke 53*. (September 2013). hlm.7. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zulkarnain Yusuf, *Loc.Cit*,hlm.60. [↑](#footnote-ref-14)
14. Jurnal Tanah Air Walhi (Edisi Desember 2012-Januari 2013) membahas tentang eksistensi PTPN XIV atas praktek perampasan tanah masyarakat Polongbangkeng dan upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) serta LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI Sul-Sel) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dian Aries Mujiburohman, *et al.*, *Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Awal Abad 21: Hasil Peneltian Sistematis STPN 2012*(Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2012 ), hlm.75. [↑](#footnote-ref-16)
16. Dalam buku ini membahas tentang sejarah konflik pertanahan dan gerakan perlawanan petani melawan skema perampasan tanah oleh Negara atau perusahaan swasta [↑](#footnote-ref-17)
17. Gerakan-Gerakan Agraria Transnasional secara umum membahas tentang kiprah gerakan agrarian dalam menghasilkan transformasi sosial di mancanegara termasuk di Idnonesia [↑](#footnote-ref-18)
18. Dalam skripsi ini menggambarkan gerakan petani merupakan suatu bentuk perlawanan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok petani yang terorganisir untuk menciptakan terjadinya perubahan dalam pola interaksi atau keadilan untuk petani di dalam masyarakat. [↑](#footnote-ref-19)
19. Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 90. [↑](#footnote-ref-21)
21. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.66. [↑](#footnote-ref-22)
22. Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Cet. II; Yogyakarta: Ombak), hlm. 131. [↑](#footnote-ref-23)
23. Abd. Rahman Hamid dan Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (Cet .II; Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2011) hlm. 47-49. [↑](#footnote-ref-24)
24. Daliman, *Op.Cit*., hlm.83. [↑](#footnote-ref-25)